

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agustina, R, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003

Dwiyanto, A, *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021

Effendi, dkk. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020

Fakultas Hukum Universitas Mlikussaleh, *Buku Panduan Akademik*, Lhokseumawe: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2016

Fuady, M, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Cetakan ke-2, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001

H.A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002

Hadjon, P, M. "*Tentang Wewenang*," Yuridika, No. 5 & 6 Tahun XII, September-Desember 1997

Hadjon, P, M. dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011

Huda, N, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, 2012

Ibrahim, J, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006

Jerry FitzGerald, *Fundamentals of Systems Analysis*, New York: John Wiley & Sons, 1981

Kaho, J, R, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Polgov Fisipol UGM, 2012

Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975

Ludwig von Bertalanffy, *General System Theory: Foundations, Development, Applications*, New York: George Braziller, 1968

Manan, B, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994

Manan, B, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2001

Marzuki. P, M, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020

Narbuko, C, Sri Mamudji, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007

Nugroho, Riant. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021

Sinambela, Lijan Poltak. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2020

Soekanto, S, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, Bandung: Alumni, 2003

Soekanto, S, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007

Susanto, A, *Sistem Informasi Akuntansi*, Bandung: Lingga Jaya, 2013

Sutabri, T, *Konsep Sistem Informasi*, Yogyakarta: Andi Offset, 2012

Triwulan, T, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan
Daerah Air Minum Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe.

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal
Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Ie Beusaree Rata dan
Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe.

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air
Minum.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
12 Tahun 2021.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 39 Tahun 2024 tentang Rencana Induk
SPAM 2021–2040

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. Skripsi, Artikel, Jurnal, dan Karya Tulis Ilmiah Lainnya

Pratama, A, “Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Sumber
Daya Air oleh Pemerintah Daerah,” *Jurnal Ius Quia Iustum* Vol. 29 No. 4,
2022

Lestari, D, dan Gunawan, H, “Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Dampak Lingkungan Pembangunan Infrastruktur di Daerah,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 51 No. 3, 2021

Mustamu, J, "Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Sasi*, Vol. 17, No. 2, 2011

Friedman, L, M, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), sebagaimana dikutip dalam "Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," *Jurnal Hukum*, Universitas Muhammadiyah Bima

Sastro, M, “Partisipasi Publik dalam Perspektif Hukum Perizinan Lingkungan,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Berkelanjutan*, Vol. 5, No. 2, 2018

Syari'ah, M, "Pembatalan Qanun Aceh Melalui Executive Review dan Judicial Review", Vol. 21, No. 2, 2019

Andriani, R, “Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik,” *Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol. 9 No. 2, 2020

Rahmad, R, “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Air Bersih di Daerah,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Daerah*, Vol. 3, No. 2, 2021

Permata, S, I, Analisis Pelayanan Air Bersih di Kota Lhokseumawe. *Skripsi*, Fakultas Teknik, Universitas Malikussaleh, 2023

Utama, Y, J, "Konsep Tanggung Jawab Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 43, No. 4, 2014

D. Website

Badan Pusat Statistika Lhokseumawe, Jumlah Penduduk 2026, Sumber: <https://lhokseumawekota.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/ab95a4519b392625be643e1f/kota-lhokseumawe-dalam-angka-2026.html> , Diakses pada 18 Juni 2026

Bappeda Kota Lhokseumawe. *Profil Daerah Kota Lhokseumawe*. 2023.

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
Jakarta: *Kementerian PUPR*, 2021

Laporan Kinerja Sektor Air Minum Indonesia. Jakarta: *Kementerian PUPR*, 2022

Pengertian Atribusi, Delegasi dan Mandat," Klinik Hukumonline,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandat-lt5816ab6ea74a7/>

Pj Wali Kota Lhokseumawe: Bisa Langsung Diminum, SPAM Lhokseumawe Jadi
Proyek Percontohan Pertama di Indonesia", laman resmi Pemerintah Kota
Lhokseumawe

Wali Kota Lhokseumawe dan Tim Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Tinjau
Proyek SPAM", Setdako Lhokseumawe,